

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005)
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2011)
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 2016)
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007)
- Marpaung, Laden, *Asas-teori-praktek hukum pidana*, (Jakarta: Sinar grafika, 2005)
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012)
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)

Siombo, Marhaeni Ria, *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007)

———, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 2013)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

Sunarso, Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)

Sunu, Pramudya, *Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 14001*, (Jakarta: Grasindo, 2001)

Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012)

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
11. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pemberian Dana Antisipasi Untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Milik Masyarakat

yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007

15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tim Percepatan Penyelesaian Pembayaran Jual Beli Tanah dan Banguna Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo di Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007
16. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo

C. Lain-Lain

Bawole, Herlyanty Yuliana Anggraeny, *Implementasi Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi Menurut Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Lex Crimen Vol. III/No. 3 (Jakarta, 2014)

Candra, Septa, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Restorative Justice; a Review of Criminal Law Reform in Indonesia)*, Jurnal Rechtsvinding Volume 2 Nomor 2, (Jakarta, 2013)

Muzafar, Teuku, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Di Dhamasraya, Sungailiat, dan Tanjung Pandan Sumatera Barat*, (Jurnal, Fakultas Hukum Lancar Kuning, 2014)

Pujiyono, *Pendekatan Restoratif Sebagai Upaya Mengatasi Dilema dan Problem Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Orasi Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)

Rochaeti, Nur, *Prospek Peradilan Restoratif Berdasarkan Pancasila Sebagai Sarana Non Penal Dalam Penanggulangan Delikueni Anak Dimasa Datang*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum (Semarang, 2013)

Suhariyanto, Budi, *Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara (Restorative Justice in Sentencing Corporate Business Optimization of Corruption by Country Returns Losses)*, Jurnal Rechtvinding Volume 5, Nomor 3 (Jakarta, 2016)

Wiharyangti, Dwi, *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Pandecta Volume 6 Nomor 1, (Semarang, 2011)

Manuan, Orpa Ganefo, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2005)

D. Internet

<http://www.bpls.go.id/>, diakses pada tanggal 14 September 2017 pukul 20:32 WIB

<http://www.menlh.go.id/deklarasi-pengendalian-pencemaran-dan-kerusakan-lingkungan-akibat-pertambangan> diakses pada tanggal 17 Juli 2017 pukul 22:05 WIB